

**POLITIK IDENTITAS: KONSTRUKSI SOSIAL DAN RELASI KEKUASAAN****Endrizal***Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah LAIN Bukittinggi  
e-mail: rizalpiliang84@gmail.com***Novi Hendri***Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah LAIN Bukittinggi  
e-mail: novi.hendri@yahoo.co.id**Diterima: 8 Februari 2018**Direvisi : 13 Mei 2018**Diterbitkan: 30 Juni 2018***Abstract**

*This paper discusses the construction of social identity that occurs among the minority community in Indonesia. Discrimination and violence that occur against minorities ethnic is considered as a common thing. So that, most of ethnic minorities seems resigned, accept it as destiny, or as an inevitable consequence for being a minority group in the middle of a majority society. People can easily, in the name of abstract racial or religious identity and far from reality, kill the neighbors who are beside their own homes, or groups imagined as others. People often get caught up in the illusion of unique and unchoosable identity. In this study it was found that identity was built up in discourse and as a result of colonialism that occurred in Indonesia, besides that, identity was closely related to the rise of power. Primordialism identity arises through 3 phases, 1) Identity is obtained naturally, hereditary. 2) Constructivism. Identity is something that is formed and results from complex social processes. Identity can be formed through cultural ties in society. 3) Instrumentalism. Identity is something that is constructed for the interests of the elite and emphasizes more on the aspect of power. The issue of identity should not be used as a cause of conflict, as a threat to the continuity of human civilization, but on the contrary, opens up new dimensions of justice and equality.*

**Keywords:** *Identity, Social Construction, Power Relations*

**Abstrak**

Tulisan ini membahas tentang konstruksi identitas sosial yang terjadi di tengah masyarakat minoritas Indonesia. Diskriminasi dan kekerasan yang terjadi terhadap etnis minoritas dianggap sesuatu yang biasa. Sehingga tidak sedikit etnis minoritas yang seolah pasrah, menerimanya sebagai takdir, atau merupakan sebuah konsekuensi yang tak terelakan sebagai golongan minoritas ditengah masyarakat mayoritas. Orang dapat dengan mudah, atas nama identitas ras atau agama yang abstrak dan jauh dari realitas justru menghabisi tetangga yang ada disamping rumahnya sendiri, atau kelompok-kelompok yang diimajinasikan sebagai yang lain (orang lain). Orang sering terjebak ke dalam ilusi tentang identitas yang unik dan tanpa pilihan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa identitas terbangun di dalam diskursus dan akibat dari kolonialisme yang terjadi selama ini di Indonesia, selain itu identitas erat kaitannya ralisasi kekuasaan. Primordialisme. Identitas muncul melalui 3 fase, 1) Identitas diperoleh secara alamiah, turun temurun. 2) Konstruktivisme. Identitas sebagai sesuatu yang dibentuk dan hasil dari proses sosial yang kompleks. Identitas dapat terbentuk melalui ikatan-ikatan kultural dalam masyarakat. 3) Instrumentalisme. Identitas merupakan sesuatu yang dikonstruksikan untuk kepentingan elit dan lebih menekankan pada aspek kekuasaan. Persoalan identitas jangan dijadikan sebagai penyebab lahirnya konflik, sebagai suatu ancaman bagi kelangsungan peradaban manusia, namun sebaliknya, membuka dimensi-dimensi baru mengenai keadilan dan kesetaraan.

**Kata Kunci:** *Identitas, Konstruksi Sosial, Relasi Kuasa*

**Latar Belakang**

Masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam etnik, ras, suku bangsa dan

bahasa, telah menjadikan Indonesia sebagai Negara multi-kultural. Seiring dengan bermacam ragamnya suku bangsa yang hidup



di Indonesia tentu saja melahirkan persoalan-persoalan klasik yang telah diperdebatkan semenjak zaman klasik tempo dulu, yakni perdebatan seputar identitas yang membedakan antara etnis yang satu dengan yang lainnya.

Dari berbagai macam suku bangsa tersebut tentu saja ada yang mayoritas dan minoritas. Pertarungan antara mayoritas dan minoritas seputar identitas inilah yang menarik untuk kita lihat. Seperti masyarakat minoritas China, minoritas etnis dan agama di tengah mayoritas. Pilihan yang cukup dilematis bagi masyarakat minoritas, ketika identitas mereka dipertanyakan. Apakah etnis minoritas (China) merupakan orang Indonesia, ataukah mereka tetap orang China namun berbudaya Indonesia?

Lahirnya persoalan politik identitas ditengah masyarakat multi-kultural pada dasarnya muncul ditengah masyarakat yang secara politik kekuasaan tidak diuntungkan. Secara politik kekuasaan etnis mayoritas tidak diuntungkan ini menyebabkan munculnya perlawanan di tengah masyarakat mayoritas, seperti munculnya wacana terkait dengan persoalan identitas etnis, ras, agama dan kelompok. Wacana untuk mencintai budaya daerah masing-masing, menguatkan budaya local masing-masing daerah, sampai kepada wacana bahwa pemimpin daerah harus putra daerah. Bahkan yang lebih ironis adalah munculnya wacana atas nama agama di tengah masyarakat multi-kultural.

Menguatnya identitas etnis, agama dan kelompok ditengah masyarakat multi-kultural menyebabkan terjadinya konflik ditengah masyarakat dan dapat mengancam keutuhan sebuah Negara NKRI.

Selain itu menguatnya politik identitas ditengah masyarakat erat kaitannya dengan persoalan relasi kekuasaan. Walaupun dalam realitas politik kontemporer masih kita dapati relasi kekuasaan yang bersifat “biner” (dikotomis), akan tetapi kompleksitas

bekerjanya kekuasaan di dalam relasi sosial saat ini tidak dapat hanya secara sederhana dipahami sebagai dua polarisasi. Gambaran di atas menunjukkan bagaimana konstruksi mengenai identitas memiliki signifikansi untuk memobilisasi tujuan-tujuan politik. Hal demikianlah yang menyebabkan identitas menjadi bagian yang signifikan di dalam relasi yang berkaitan dengan kekuasaan, baik menjadi sarana dominasi maupun resistensi (*artikuleratif*). Tulisan ini mencoba untuk melihat konstruksi identitas yang dapat memfasilitasi kepentingan-kepentingan artikuleratif, meskipun di sisi lain juga dimobilisasi untuk tujuan politik praktis. Selain itu tulisan ini mencoba melihat kemunculan wacana politik mengenai batasan-batasan apa yang membentuk identitas sebagai suatu sumber daya politik (*political resources*) dan sekaligus sebagai sarana politik (*political means*).

### **Mempersoalkan Identitas**

Persoalan identitas seakan tidak pernah henti-hentinya menjadi perdebatan dikalangan masyarakat kita, baik orang awam maupun akademisi. Namun, yang menjadi persoalan apa itu identitas? Identitas seakan merupakan kata ganti yang kita terima begitu saja, menerimanya tanpa persoalan, sesuatu yang sudah jelas pada dirinya sendiri. Padahal konsep dan persoalan identitas itu justru sangat licin untuk diperikan, dan selalu mampu mengerucut dari tangkapan konseptualisasi yang ketat. Mengutip bahasanya Huntington (1996) konsep identitas itu seperti dosa: betapapun seringnya kita menolaknya, kita tidak pernah bisa lepas darinya.<sup>1</sup>

Banyak kajian yang terdiri dari literatur sosiologi maupun politik membagi persoalan identitas ke dalam beberapa kategori, diantaranya: identitas sosial (kelas, ras, etnis, gender dan seksualitas) dan identitas politik

<sup>1</sup> Samuel. P Huntington, *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*, (New York: Simon & schuster: 1996), h. 42.



(nasionalitas dan kewarganegaraan-*citizenship*). Identitas menentukan posisi subyek di dalam relasi atau interaksi sosialnya, sedangkan identitas politik menentukan posisi subyek di dalam suatu komunitas melalui suatu rasa kepemilikan (*sense of belonging*), sekaligus menandai posisi subyek yang lain di dalam suatu pembedaan (*sense of otherness*). Hal ini disebabkan oleh identitas juga menyangkut apa apa-saja yang membuat sekelompok orang menjadi berbeda dengan yang lainnya, oleh sebab itu, konstruksi identitas sangat erat berkaitan dengan konstruksi mengenai “perbedaan” (*difference*).

Identitas politik (*political identity*) secara konsep berbeda dengan “politik identitas” (*politics of identity*), karena identitas politik merupakan konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subyek dalam ikatan suatu komunitas politik, sedangkan pengertian politik identitas mengacu pada mekanisme politik pengorganisasian identitas (baik identitas politik maupun identitas sosial) sebagai sumber daya dan sarana politik.

Dalam konteks dimana identitas dimobilisasi bagi kepentingan artikulatif, adanya peluang-peluang untuk memunculkan klaim-klaim terhadap identitas sosial-politik baru yang secara politis meunculkan kondisi dilematis dari perkembangan masyarakat kontemporer. Sedangkan pada sisi yang lain, ruang (wilayah) politik bagi klaim identitas baru tersebut dapat melahirkan konflik ditengah masyarakat multi-kultural. Sedangkan pada sisi yang lain, pengaturan-pengaturan politik yang dapat menjamin berlangsungnya suatu proses kesetaraan dengan cara demokrasi liberal dapat membuka peluang yang lebih besar bagi pengakuan public dan pengorganisasian politik dari klaim-klaim identitas baru secara potensial dapat memunculkan konflik. Situasi seperti inilah yang menjadikan pentingnya merefleksikan kembali kaitan antara identitas sosial-politik

yang secara dinamis mempengaruhi upaya-upaya mengartikulasikan kepentingan politik sekelompok orang. Sehingga pengkategorian identitas tidak dapat lagi secara sederhana kita pahami ke dalam polarisasi identitas sosial-politik. Hal ini disebabkan oleh identitas sosial atau budaya seseorang, contohnya yang didasari oleh sistem kelas (bawah, menengah, atas), seksualitas dan agama, semua itu merupakan sumber bagi pembentukan identitas politik dan karenanya sangat signifikan bagi mobilisasi politik identitas.

Berkembangnya politik identitas ditengah masyarakat terjadi sebagai bentuk kepentingan politik yang berakar dari agensi sosial yang dipengaruhi oleh efek-efek poskolonialisme sebagai bentuk konsekuensi dari akibat kolonialisme yang terjadi selama ini. Akibat yang timbul dari kolonialisme ini jamak kita jumpai di dalam globalisasi dewasa ini. Seperti halnya efek kolonialisme, globalisasi juga melahirkan formasi identitas politik yang karakteristiknya dapat kita kenali dan kita lihat melalui praktek dan struktur dominasi dan resistensi.

Ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan mengapa “identitas” itu sendiri perlu dan pantas mendapat perhatian besar. Pertama, dalam hidup sehari-hari kita tidak pernah lupa baik secara langsung maupun tidak langsung menanyakan ‘kamu siapa’ kepada seseorang yang baru kita kenal. Pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang mendasar dalam setiap interaksi sosial. Ketika orang bertanya ‘siapa engkau’, ia tidak sekedar ingin tahu tentang nama, alamat dan jabatan, ia bertanya mengenai identitas.

Pertanyaan seperti ini sebenarnya menohok tepat pada inti terdalam dalam diri seseorang sebagai subyek. Kalau orang yang ditanya tersebut gagal menjawab pertanyaan, maka ia pun gagal dalam menampilkan identitasnya, dan sekaligus gagal menghadirkan diri sebagai subyek.



Dapat dikatakan, 'subyektifitas' ini merupakan landasan pertama dalam setiap interaksi sosial. Ketika dua orang saling berkenalan dan bertanya, orang mengukur 'subyektifitas' yang bersangkutan, untuk kemudian dibandingkan dengan 'subyektifitasnya' sendiri. Hasil perbandingan ini memberikan informasi tentang persamaan dan perbedaan antara dua orang yang berinteraksi, lalu dari sini dapat dimulai suatu interaksi sosial. Kedua, seperti yang diungkapkan Week (1990) mengenai pengertian identitas adalah tentang *belonging*, tentang persamaan dengan sejumlah orang dan tentang apa yang membedakan kamu dengan yang lainnya. Sebagai sesuatu yang paling mendasar, identitas memberi kamu rasa tentang lokasi pribadi, inti yang stabil bagi individualitas kamu.<sup>2</sup> Dari definisi tersebut akan nampak bahwa setiap individu siapa pun dia, memerlukan identitas untuk memberinya *sense of belonging* dan eksistensi sosial. Maritza Montero (tanpa tahun) juga mengatakan bahwa identitas memberikan 'rasa aman' melalui *belonging* dengan sekelompok orang yang sama.<sup>3</sup>

Juga harus ditambahkan, identitas sering menjebak orang pada sederet soal lainnya. Sebutlah misalnya, padanan kata dalam bahasa Indonesia yang dulu, khususnya ketika rezim orde baru sedang mencapai titik zenitnya, sering dipakai untuk identitas : "jati diri". Di sana diandaikan begitu saja bahwa seakan-akan ada "diri" yang "sejati" yang benar dan kekal, yang melampaui ruang waktu, bersifat *trans-historis*, dan tidak tersentuh oleh silang sengkabut pertarungan kekuasaan dan kepentingan.

<sup>2</sup> Jeffrey Week, "The Value of Difference" dalam Jonathan Rutherford (ed.) *Identity Community, Culture, Difference*, (London: Lawrence & Wishart, 1990), h. 76.

<sup>3</sup> Montero, Maritza "Latin American Social Identity" dalam *Multiculturalism and the State*, Vol. 1, Collected Seminar Papers, London.

Apa yang dilekatkan kepada jati diri itu bisa berubah-ubah, sudah tentu, pilihan unsur yang mau ditonjolkan itu sangat tergantung kepada kepentingan yang hendak dibawa. Jadi, pada suatu waktu, para birokrat jamak berbicara soal "jati diri kebudayaan nasional" (untuk memperlawankannya dengan pengaruh budaya asing yang dekaden) tanpa sibuk memeriksa apa yang dimaksud dengan kebudayaan dan maupun kenasionalan. Begitu juga orang yang sering membicarakan "jati diri keminangan", apa yang sejati dalam diri orang Minang, tanpa menyadari pertarungan dibalik sang subyek "Minang" itu sendiri yang serba *problematic*. Atau jati diri ke Chinaan yang melekat pada diri orang China, yang bagaimanapun, sekali China tetap China.

Kita mengenal etnis China sebagai etnis minoritas yang sangat rawan terhadap persoalan-persoalan yang berhubungan dengan diri dan identitasnya. Diskriminasi dan kekerasan terhadap etnis tersebut boleh jadi sudah merupakan hal yang dianggap biasa. Sedemikian biasa dan normalnya sehingga tidak sedikit orang-orang etnis China yang seolah pasrah. Mereka seperti menerimanya sebagai takdir, atau merupakan sebuah konsekuensi yang tak terelakkan sebagai golongan minoritas asing. Hal ini tentunya tak pelak berakibat dan berdampak terhadap identitas etnis China itu sendiri.

Sudah pasti, dalam soal ini, yakni ketika identitas seseorang atau suatu kelompok dipandang sebagai sesuatu yang sudah jadi, sejati dan tidak dapat berubah, utuh bulat dengan batas-batas yang serba pasti, dan unsur-unsur pembentuknya bahkan dianggap bersifat *trans-historis*, disitu identitas menjadi perkara yang berbahaya.

Orang dapat dengan mudah, atas nama identitas ras atau agama yang abstrak dan jauh dari realitas justru menghabisi tetangga yang ada disamping rumahnya sendiri, atau kelompok-kelompok yang diimajinasikan



sebagai yang lain (orang lain). Karena disana orang sering terjebak ke dalam apa yang disebut oleh Amartya Sen sebagai “ilusi tentang identitas yang unik dan tanpa pilihan”.<sup>4</sup>

Masalahnya bahkan lebih berbahaya jika “yang lain” itu juga dipandang sebagai ancaman, entah riil ataupun (lebih seiring) potensial, entah konkrit (pesaing bisnis di seberang jalan yang kebeulan China dan beragama Kristen) maupun abstrak, seperti jejaring kapitalisme global yang melalui jejaring bisnis China perantauan menguasai Asia Tenggara dan khususnya Indonesia.<sup>5</sup>

Asal muasal terjadinya konflik akibat identitas bisa bersumber dari perjumpaan konkrit sehari-hari pada tataran lokal, atau peristiwa-peristiwa penting pada tataran nasional, atau bahkan pada peristiwa-peristiwa global yang sering kali justru tidak punya kaitan langsung. Seperti konflik Israel-Palestina yang terjadi di jalanan seputar jalur Gaza, misalnya, dapat dengan sangat mudah dialihkan ke jalanan di Jakarta atas nama “solidaritas Islam” melawan “konspirasi AS-Yahudi”. Seakan-akan disitu batas-batas ruang waktu menjadi sangat nisbi.

Agaknya tidak berlebihan kalau kita mengatakan bahwa persoalan identitas telah menjadi salah satu persoalan paling besar dalam sejarah filsafat dan politik dewasa ini, persis ketika batas-batas wilayah menjadi kabur, dan teknologi transportasi serta komunikasi mendorong orang untuk terus menerus bergerak dan berpindah tempat. Dalam dunia yang tunggang-langgang itu *a runaway world*, istilah yang dipopulerkan oleh Giddens, yang menjadi ciri dunia kita sekarang ini. Maka persoalan identitas menjadi

pertaruhan ultim. Sebab, identitas memberi orang rasa memiliki dan dimiliki, kebersamaan dengan sejumlah orang dan semacam “rumah” dimana seseorang dapat tertirah dan sekaligus pada saat yang bersamaan, menarik garis pembatas dengan mereka yang diimajinasikan sebagai yang lain atau orang asing.

Namun demikian, ketika kita mempersoalkan identitas jamak dijumpai teori-teori sosial dan ekonomi yang sering terjebak ke dalam dua posisi ekstrem: entah menafikan sama sekali soal identitas, atau sebaliknya mengasumsikan identitas seseorang atau suatu kelompok sebagai “afiliasi tunggal”.

Kerumitan pluralitas kelompok dan kemajemukan loyalitas dinafikan dengan melihat setiap orang sepenuhnya tertanam hanya di dalam afiliasi tunggal yang tegas, menggantikan kekayaan hidup manusia dengan rumusan sempit yang menegaskan bahwa setiap orang “disituasikan” hanya dalam satu kelompok organis tertentu.

Asumsi singularitas identitas inilah yang paling sering menjadi titik soal dalam serangkaian kekerasan atas nama “politik identitas” dan mungkin tanpa disadari, menjadi asumsi yang paling luas diterima ketika seseorang berbicara mengenai identitas. Dan persis dalam soal inilah Martiya Sen mengkritik keras tesisnya Huntington (1996) yang mengatakan bahwa konflik yang terjadi ditengah masyarakat selama ini lebih banyak disebabkan oleh budaya, agama, dan ras.<sup>6</sup> Atau lebih dikenal dengan istilah benturan peradaban.<sup>7</sup>

Dalam bukunya Huntington, dia secara gamblang membedakan dan memberikan kategorisasi tentang peradaban Barat dan peradaban Timur (Islam), peradaban Hindu,

<sup>4</sup> Bertrand Russell, *Sejarah Filsafat Barat: dan Kaitannya Dengan Kondisi Sosio-Politik dari Zaman Kuno Hingga Sekarang* (terj), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 32.

<sup>5</sup> James Kynge, *Rahasia Sukses Ekonomi Cina* (terj) Jakarta: Mizan, 2006), h. 54.

<sup>6</sup> Samuel. P Huntington, *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*, (New York: Simon & schuster: 1996), h. 32.

<sup>7</sup> Amartya Sen, *Identity and Violence: The Illusion of Destin* *Issues of our time* (New York: W.W. Norton & Company, 2006), h. 127-130.



peradaban Bhuddis, peradaban khonghucu, dst. Lalu dia memakai kategori-kategori yang serba tunggal ini untuk membagi wilayah dan penduduk dunia ke dalam berbagai dunia sejalan dengan kategori agama: dunia Islam, dunia Hindu, Buda, dst. Cara pandang reduksionis semacam ini secara tidak langsung menafikan sama sekali keanekaragaman dakhil (*internal diversities*) suatu peradaban dan jangkauan interaksi, baik intelektual maupun material, yang justru lebih sering menyeberangi tapal-tapal batas peradaban. Satu hal yang harus menjadi catatan bagi kita, bahwa dalam kehidupan normal, kita menjadi anggota dari berbagai kelompok berbeda yang salah satu unsurnya tidak perlu menafikan unsur lain.

Oleh karena itu, dalam mempersoalkan identitas kita perlu kembali memeriksa yang menjadi persoalan dalam identitas tersebut. Pertama, pengakuan kemajemukan dalam identitas, yang tak terhidarkan, dimana kepentingan salah satu unsur identitas tidak berarti menafikan unsur yang lainnya. Kedua, sebagai akibatnya, sangat penting untuk menekankan peran pilihan individu dalam menilai secara kritis unsur-unsur identitas mana yang mau dipakai, dimainkan, ditonjolkan sesuai dengan konteksnya.

Sudah tentu menekankan unsur pilihan tidak berarti menafikan kendala-kendala yang membatasi pilihan-pilihan tersebut. Setiap pilihan selalu dibuat dalam batas-batas yang dimungkinkan baginya. Memakai metafora lain, identitas dalam artian tertentu, adalah suatu permainan yang selalu bersifat situasional. Dan suatu permainan hanya dapat dimainkan di dalam batasan-batasan yang ada, entah itu hasil kesepakatan bersama atau juga digariskan oleh kekuasaan tertentu.

### Ruang Politik Identitas

Realitas sosial seperti yang penulis paparkan pada pembahasan di atas, mengantarkan kita pada suatu refleksi bahwa

saat ini menteorisasi kekuasaan sebagai suatu dimensi penindasan yang bersifat tunggal (*a singular dimension of oppression*) seperti munculnya penindasan dalam kelas sosial, ras, gender tidak lagi mampu untuk menjelaskan kompleksitas dalam dunia kontemporer. Sebab itu diperlukannya penjelasan mengenai relasi antara berbagai dimensi penindasan dengan strategi-strategi resistensi. Persoalan dominasi dalam realitas kontemporer dapat kita bedakan dari pola-pola sebelumnya (masa lalu) melalui dominasi dalam kehidupan sosial maupun budaya oleh logika pengorganisasian yang bersifat *spatial* (sekat-sekat), dan bukan waktu atau perubahan zaman.<sup>8</sup>

Fenomena lumpuhnya politik saat ini perlu adanya ruang dan tindakan politik atau yang sering disebut sebagai *cognitive mapping* (pemetaan kognitif). Pemetaan terhadap kognitif merupakan sebuah bentuk budaya politik radikal dimana obyek fundamentalnya adalah *'the world space of multinational capital'* (ruang dunia kapital multinasional). Pemetaan kognitif ini adalah sebuah kesadaran terhadap proses modernitas yang sedang berlangsung, sekaligus ketidakmampuan subyek di dalam meraih totalitas (seperti nilai-nilai atau ideologi yang mutlak). Pemetaan kognitif pula yang memungkinkan orang menyadari posisi mereka di dunia, dan karenanya memberikan sumber bagi resistensi dan penciptaan sejarah diri mereka sendiri. Sebab itu, logika kapital yang menciptakan suatu perkembangan di dalam ruang ketidak-adilan. dapat menciptakan peluang bagi tumbuhnya budaya-budaya oposisi (*oppositional cultures*) dan gerakan sosial baru melawan kepentingan mayoritas sebagai suatu ruang resistensi.

Dalam identitas yang membentuk kesadaran kita terhadap diri kita sebagai individu maupun makluk sosial dikonstruksi oleh proses-proses cultural bukan bersifat *pre-*

<sup>8</sup> Friedric Jameson, *Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism*, (London: Verso, 1991), h. 16.



given. Konstruksi sosial dan cultural ini menggambarkan suatu proses cultural yang tidak memerlukan simbol-simbol kemanusiaan universal, melainkan suatu diferensiasi dan gerakan dimana identitas merupakan karakteristik masyarakat moderen. Kelompok-kelompok yang ter-sub-ordinasi dapat menggunakan pemikiran semacam ini untuk membuka tabir kepalsuan yang ditawarkan oleh pemikiran mengenai otoritas 'individu' yang mutlak, untuk mempertahankan posisi mereka sebagai 'the other' atau minoritas. Dengan demikian, maka konstruksi bagi identitas alternatif merupakan bagian dari politik resistensi atau politik oposisi yang memberikan suatu konstruksi perlawanan bagi kelompok dominan.

Batasan-batasan di dalam menentukan lokasi bagi identitas di dalam ruang politik kemudian merupakan sesuatu yang tidak dapat bersifat mutlak, tidak bersifat pasif, dan bersifat dialektis.<sup>9</sup> Dalam pandangan Keit ada tiga lokasi bagi batasan-batasan dalam politik identitas yakni: (1) lokasi bagi perjuangan (*location of struggle*); (2) komunitas resistensi (*communities of resistance*); (3) ruang-gerak politik (*political spaces*). Lokasi bagi perjuangan (*location of struggle*) merupakan suatu ruang dimana individu memasuki politik. Ruang ini dapat bersifat riil (*real space*), imajiner (*imaginary space*), atau simbolik (*symbolic space*). Dalam konteks ini, penentuan lokasi bagi masuknya individu minoritas ke dalam politik identitas mayoritas haruslah ditempatkan di dalam relasi-nya dengan masyarakat. Erat kaitannya dengan relasi-relasi sosial seperti apa yang mereka bagi bersama; apakah mereka saling berbagi pengalaman di bawah suatu penindasan; apakah perlu bagi kita untuk mengabaikan perbedaan-perbedaan dalam rangka membentuk suatu aliansi melawan hegemoni

kekuasaan; Perbedaan-perbedaan manakah yang perlu diartikulasikan dan mana yang tidak perlu bagi suatu perjuangan lebih lanjut.<sup>10</sup>

### Identitas Sebagai Konstruksi Sosial dan Pilihan

Penulis berangkat dari cerita esai Rachel Newman di Newsweek (dalam *Majalah Tempo*, edisi, Oktober, 2001), sebulan setelah serangan ke menara kembar World Trade Center. Newman melukiskan perasaannya dalam sebuah esainya seperti yang penulis kutip di bawah ini:

“ketika saya berumur 19 tahun, saya pindah ke New York, jika ditanyakan kepada saya bagaimana saya melukiskan perasaan saya ketika itu, maka saya akan menjawab bahwa saya seorang musisi, penyair, seniwati..., pada dataran politik tertentu seorang perempuan, lesbian, dan Yahudi. Menjadi seorang Amerika tidak masuk dalam daftar saya. Namun, pada tanggal 11 September, semua itu berubah. Saya jadi sadar bahwa selama ini saya menerima kebebasan yang saya miliki begitu saja. Kini saya membawa bendera Amerika di tas punggung saya, bersorak saat pesawat jet tempur melintas di udara dan menyebut diri saya seorang patriot.”

Apa yang disuarakan Newman melukiskan dengan dramatis perubahan kesadaran pada masyarakat Amerika, atau setidaknya sekelompok elit masyarakat itu, mengenai bagaimana memandang dan memperlakukan identitas nasional mereka setelah peristiwa 11 September yang mengubah globalisasi, multikulturalisme, kosmopolitanisme, imigrasi, subnasionalisme, anti-nasionalisme, dll, telah mengguncang

<sup>9</sup> Keith, Michael and Steve Pile, *Place and the Politics of Identity*, (London and New-York: Routledge, 1993), h. 30-36.

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 38.



kesadaran dan menggusur obrolan soal “identitas nasional” ke belakang.

Di dalam proses itu, justru identitas yang berdasarkan etnis, ras, dan gender mencuat kepermukaan. Tetapi peristiwa 11 September mengubah segalanya. Tiba-tiba orang membutuhkan semacam simbol yang serba pasti untuk menegaskan identitas mereka. Dalam bahasanya Derrida, konsep mengenai identitas selalu menunjuk pada suatu proses memberi penanda yang membedakan orang lain dengan diri kita dan apa yang menjadi penanda bagi persamaan kita dengan orang lain (*identity is a dialogic process of signifying and sharing similarities with others*).<sup>11</sup>

Masalah identitas ini juga sering disinggung oleh Anderson dalam bukunya *imagined communities*, di sana Anderson memaparkan secara rinci tentang proses terbentuknya sebuah negara. Dan Anderson mencoba untuk memisahkan antara kategori mengenai “kita” yakni yang menjadi bagian dari komunitas, dan “mereka” yang bukan menjadi bagian dari komunitas negara kita.<sup>12</sup>

Menurut Stuart Hall, identitas seseorang tidak dapat dilepaskan dari *sense* (rasa/kesadaran) terhadap ikatan kolektivitas, identitas bukan suatu entitas yang final dan statis, melainkan sesuatu yang selalu tumbuh.<sup>13</sup> Dengan demikian identitas tidak pernah sempurna, ia dalam proses dan selalu dibangun dari dalam bersama dengan yang lain. Ketika identitas diformulasikan sebagai sesuatu yang membuat seseorang memiliki berbagai persamaan dengan orang lain, maka pada saat yang bersamaan juga identitas memformulasikan *otherness* (keberbedaan)

atau sesuatu yang diluar persamaan-persamaan tersebut. Sehingga karakteristik identitas bukan hanya dibentuk oleh ikatan kolektif, melainkan juga oleh kategori-kategori pembeda (*categories of difference*)

Identitas selalu melekat pada setiap individu dan komunitas. Identitas merupakan karakteristik yang membedakan antara orang yang satu dengan orang yang lain supaya orang tersebut dapat dibedakan dengan yang lain. Identitas adalah pembeda antara suatu komunitas dengan komunitas lain. Identitas mencitrakan kepribadian seseorang, serta bisa menentukan posisi seseorang. Ada 3 pendekatan pembentukan identitas, yaitu:

1. Primordialisme. Identitas diperoleh secara alamiah, turun temurun.
2. Konstruktivisme. Identitas sebagai sesuatu yang dibentuk dan hasil dari proses sosial yang kompleks. Identitas dapat terbentuk melalui ikatan-ikatan kultural dalam masyarakat.
3. Instrumentalisme. Identitas merupakan sesuatu yang dikonstruksikan untuk kepentingan elit dan lebih menekankan pada aspek kekuasaan.<sup>14</sup>

Identitas seperti yang telah penulis singgung di atas, memang selalu bersifat situasional. Pada suatu titik, karena situasi dan kondisi tertentu yang diakibatkan oleh peristiwa tertentu, konfigurasi unsur-unsur yang membentuk identitas<sup>15</sup> tiba-tiba berubah;

<sup>14</sup> Gupta, A. dan J. Ferguson, *Beyond culture: Space, Identity, and the Politics of Difference* (New York: Duke University Press, 1997), h. 132.

<sup>15</sup> Huntington menyebut paling tidak ada 6 unsur yang menjadi sumber identitas: *askriptif*, seperti usia, gender, hubungan darah, ras, dll; *cultural*, seperti klan, suku, bahasa, agama, dll; *teritorial*, seperti asal-usul kampung, lingkungan tetangga, kota, provinsi; *politis*, seperti kelompok kepentingan, partai, ideology, Negara, dll; *ekonomi*, seperti pekerjaan, jabatan, profesi, kelas; dan *sosial*, seperti pertemanan, club, kolega, dll.

<sup>11</sup> Jacques Derrida. *Dissemination*. (London: The Athlone Press, 2000), h. Xiv.

<sup>12</sup> Benedict Anderson, *Imagined Communities: Komunitas-Komunitas Terbayang*, (terj), Yogyakarta: Pustaka Palajar dan Insist Press, 2001), h. 68.

<sup>13</sup> Dalam Purwana, Bambang Hendarta Suta. *Konflik Antarkomunitas Etnis Di Sambas 1999: Suatu Tinjauan Sosial Budaya*, (Pontianak: Romeo Grafika, 2003), h. 56.



sebagian unsur yang sebelumnya ada di latar belakang dan menjadi bagian yang tidak disadari, tiba-tiba mencuat kepermukaan dan menjadi titik api bagi konfigurasi yang baru. Peristiwa tragis di Jakarta, Solo tanggal 13-15 Mei 1998 punya dampak serupa, khususnya bagi etnis China di Indonesia.

Hampir sebagian besar toko-toko milik orang China dijarah dan di bakar oleh massa, anak-anak perempuan mereka di perkosa, di bunuh dan di aniaya. Aksi massa seakan sudah tidak bisa untuk dibendung ketika itu. Imbas dari kerusuhan tersebut memaksa sebagian besar keturunan China untuk mengungsi keluar Indonesia. Seakan pada tahun itu merupakan tahun hancurnya keturunan China di Indonesia.

Banyak dari kalangan China mempertanyakan nasib mereka, mereka seakan berkeluh kesah, sampai kapan ke Chinaan seseorang itu berhenti, padahal mereka sudah beranak cucu di Indonesia, dan ketika Indonesia dijajah tempo dulu mereka (China) juga turut memainkan peran dalam mengusir para penjajah dari Indonesia, mereka menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Apakah ke Chinaan seseorang akan lepas seiring dengan pergantian nama? Apakah ketika mereka memilih kewarganegaraan RI? Apakah kalau mereka memeluk agama mayoritas yang dipeluk penduduk?

Sulit memberi jawaban serba pasti terhadap pertanyaan-pertanyaan itu. Sebab, semua kembali pada bagaimana ke Chinaan mau dipahami, problem yang akan terus menerus dipersoalkan sampai kapanpun. Melihat pertarungan identitas yang terjadi

dalam ranah ke China-an, sebenarnya bahwa apa yang disebut ke-China-an adalah hasil konstruksi sosial yang terus-menerus mengalami pergeseran dari generasi ke generasi.

Orang China tidak pernah memiliki konsep identitas, hanya satu konsep tentang ke-China-an, tentang menjadi China dan menjadi bukan China. Sekalipun konsep ini mengimplikasikan adanya perbedaan dalam derajat, bahwa seseorang dapat menjadi lebih China dan orang lain kurang China, hal ini dapat membawa orang pada suatu konsep tentang identitas. Konsep ke-China-an tidak mudah untuk didefinisikan. Namun setidaknya konsep ke-China-an mengandung imaji-imaji konkrit yang dapat ditunjuk, sementara identitas bersifat abstrak dan orang China tidak memiliki kata untuk itu.

Sejarah orang-orang etnis China di Indonesia atau dibelahan dunia yang lainnya bisa dilihat sebagai serangkaian pilihan eksistensial dimana mereka dapat mengidentifikasi diri. Masa lalu siapakah yang harus mereka pilih seandainya mereka tidak dapat menentukan masa lalu bagi mereka sendiri? Mungkinkah mereka menolak sejarah dan menciptakan masa lalu mereka sendiri?

Sudah tentu, pilihan historis tersebut akan menjadi titik balik yang mengarahkan seluruh orientasi kehidupan selanjutnya, suatu pilihan yang sungguh-sungguh merupakan pertarungan eksistensial. Orang China diperantauan selama ini memiliki dua pilihan yang bersifat eksklusif yang tidak dapat disatukan: entah pilihan untuk mengakui sejarah yang diberikan dan diketahui dari komunitas mereka sendiri, atau pilihan untuk merajut sejarah baru dengan sesama warga di masa mereka hidup dan tinggal. Tetapi dengan perkembangan dunia modern dan globalisasi sekarang, terbuka dua pilihan lain yang bersifat inklusif: melampaui batas-batas bangsa dan memeluk sejarah umat manusia, atau bisa juga

---

Sudah tentu mengharapkan kategorisasi yang ketat amat sangat muskil. Misalnya soal etnisitas, Huntington memasukkannya ke dalam dua kategori; askriptif, jika identitas dipahami sebagai pertalian darah yang lebih luas, dan cultural, jika etnisitas dilihat sebagai gaya hidup (*way of life*). Lihat Samuel. P Huntington, *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*, (New York: Simon & schuster: 1996), h. 120-135.



merajut masa lalu pribadi mereka sendiri secara inklusif.

Dalam pandangan Giddens, arus deras modernitas pada masa sekarang yang telah membuat dunia tunggang langgang, untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia diri dan masyarakat saling berkait erat dalam *milieu* global. Disana, dalam konteks masyarakat pasca tradisional diri menjadi suatu proyek reflektif. Seperti yang dikatakan oleh Giddens:

Munculnya mekenisme-meknisme baru identitas diri yang dibentuk dan juga membentuk institusi-institusi modernitas. Diri bukanlah entitas yang pasif, ditentukan oleh pengaruh-pengaruh ekster nal, dalam merajut identitas-identitas diri mereka, tidak peduli betapapun terbatasnya konteks lokal tindakan mereka, individu-individu itu menyumbang pada dan secara langsung memberi pengaruh sosial yang konsekuensi-konsekuensi dan implikasi-implikasinya bersifat global.<sup>16</sup>

Mungkin dalam hal ini Giddens ada benarnya dalam melukiskan identitas diri sebagai suatu proyek yang terbuka, sesuatu yang selalu dalam proses dibuat, dan bahwa diri bukanlah entitas yang pasif saja menerima pengaruh dari luar, melainkan secara aktif merajut dan meramu dari berbagai sumber (tradisi leluhur, pengalaman historis di tanah perantauan, maupun perjumpaan dan perjalanan dalam tataran global) identitas dirinya. Termasuk di dalamnya identitas-identitas diri yang dilekatkan oleh proses konstruksi sosial sebelumnya.

### Subyektivitas dan Relasi Kuasa

Di atas kita telah panjang lebar membicarakan perdebatan tentang identitas, dimana adanya ruang yang cukup lebar bagi

pilihan eksistensi dalam membicarakan identitas bukan berarti menafikan sama sekali proses-proses konstruksi sosial yang membentuk identitas tersebut. Dalam membicarakan identitas selalu harus dilihat dalam dua sisi. Pertama kita harus melihat konstruksi sosial yang dilekatkan padanya, yang mematok batasan-batasan, kedua, kita juga harus mengambil kemungkinan-kemungkinan pilihan dari individu dan kelompok.

Dua hal ini harus kita perhatikan dalam membicarakan identitas, dua hal ini bagai dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan sama sekali. Jika hanya menekankan pada salah satu aspek saja seperti konstruksi sosial yang menjadi pusat kesibukan pendekatan struktural, atau sebaliknya peran pilihan ditekankan oleh mereka yang menjunjung tinggi kemampuan *agency*, hanya akan menjebak kita ke dalam dualisme klasik yang selalu jadi mambang bagi teori-teori sosial klasik.

Kita tidak akan berbicara tentang perdebatan tersebut, namun, kita akan mencoba untuk fokus kepada kajian tentang proses *subyektivikasi*, yakni kondisi pembentukan sang subyek dan proses yang dilalui oleh seseorang untuk menjadi pribadi (*person*); atau dengan kata lain memiliki identitas tertentu baik sejauh orang itu menilai dirinya sendiri (identitas diri) maupun bagaimana dipandang atau dinilai orang lain (identitas sosial).

Jelas kedua proses pembentukan identitas ini (identitas diri maupun identitas sosial) tidak dapat saling dipisahkan. Sebab, identitas selalu merupakan deskripsi diri dan karena itu Giddens menekankan peranan *narasi diri*, tetapi sekaligus juga *askripsi sosial*, karena dalam pembentukan identitas tersebut merupakan praktik-praktik kultural yang

<sup>16</sup> Anthony Giddens, *Modernity and Self Identity*, Cambridge: Polity Press, 1991), h. 76.



berbeda-beda sesuai dengan konteks sosio-historisnya.<sup>17</sup>

Kesadaran bahwa identitas merupakan sebuah “proyek” relatif masih sangat baru. Selama ini orang sering mendudukan identitas sebagai jati diri yang bersifat universal dan kekal yang kita miliki semua. Dalam artian bahwa setiap diri pribadi memiliki esensi diri yang kita sebut sebagai identitas.<sup>18</sup>

Alih-alih melihat identitas sebagai jati diri yang melampaui ruang waktu, dewasa ini orang cenderung melihatnya lebih sebagai “konstruksi diskursif” yang maknanya berubah sesuai dengan waktu, tempat, dan kegunaannya.

Identitas terbangun di dalam diskursus, dan karenanya perlu dipahami sebagai sesuatu dibentuk di dalam ruang-ruang historis dan institusional, struktur-struktur yang dikonstruksikan oleh praktik-praktik diskursif yang spesifik. Identitas, karenanya juga tunduk kepada proses menyejarah secara radikal dan secara terus menerus berada dalam proses perubahan dan transformasi.

Kalau kita kembali kepada proses kristenisasi yang terjadi dalam masyarakat China peranakan di Indonesia maka sangat naif dan tidak mungkin rasanya masyarakat China yang mempunyai keyakinan kepada agama leluhur untuk berpindah begitu saja menjadi kristiani. Dalam hal ini meminjam bahasanya Foucault, untuk melihat identitas dan relasi kuasa dalam masyarakat China tersebut kita terlebih dahulu harus mengetahui pertarungan diskursif di mana sang subyek di temukan dan diproduksi. Untuk memahaminya ada tiga kata kunci yang di

pakai oleh Foucault,: subyek, relasi kuasa, dan genealogi.<sup>19</sup>

Menurut Hall identitas memberikan sebuah bingkai pemikiran untuk menafsirkan sekaligus mencoba untuk menciptakan tingkah laku komunitas maupun kelompok yang membedakan dia dengan kelompok lainnya.<sup>20</sup> Perdebatan Identitas seringkali dikonstruksikan untuk mengikuti perubahan kebutuhan kekuasaan yang berbeda dari masa ke masa.

Dalam budaya kita, manusia selalu dibuat menjadi subyek. Dalam pandangan Foucault ada tiga modus obyektivikasi yang membuat manusia menjadi subyek, pertama, modus penyelidikan yang mendaku memiliki status ilmiah dan menjadikan manusia sebagai obyek penyelidikannya, kedua, apa yang disebut sebagai Foucault sebagai praktik-praktik pemisahan, dimana sang subyek dipisahkan baik didalam dirinya sendiri maupun dari orang lain. Ketiga, teknologi diri, cara dimana seseorang menjadikan dirinya sang subyek.<sup>21</sup>

Subyek itu sendiri harus dipahami dalam artian ganda, ketertundukan pada orang lain melalui control dan ketergantungan, dan penautan pada identitas dirinya melalui hati nurani atau pengetahuan diri. Kedua makna ini memperlihatkan bentuk kekuasaan yang menguasai dan menundukkan.

Kita dapat menarik kesimpulan bahwa arti ganda subyek itu berkaitan erat dengan dua aspek kekuasaan. Pada satu sisi kekuasaan yang dalam bentuk dominasi atau paksaan, mematok batasan-batasan yang membuat seseorang tunduk kepada orang lain. Akan

<sup>17</sup> Anthony Giddens, *Modernity and Self Identity*, Cambridge: Polity Press, 1991), h. 120.

<sup>18</sup> Chris Barker, *Cultural Studies : Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004), h. 56.

<sup>19</sup> Michael Foucault, *Pengetahuan dan Metode: Karya-karya Penting Foucault* (terj), (Yogyakarta: Jalasutra, 2002), h. 98.

<sup>20</sup> Stuart Hall, *Who Needs Identity*, dalam Stuart Hall dan Du Gay (editor), *Questions of Cultural Identity*, (London: Sage Hall, 1992), h. 30.

<sup>21</sup> Michael Foucault, *Pengetahuan dan Metode: Karya-karya Penting Foucault* (terj), (Yogyakarta: Jalasutra, 2002), h. 128.



tetapi, pada sisi yang lainnya, yakni aspek produktif kekuasaan, batasan-batasan kekuasaan itu juga dapat membuat seseorang sekaligus mampu untuk menautkan diri pada identitasnya yang mengimplikasikan, sampai derajat tertentu.

Dalam konteks identitas ke-China-an yang menjadi perdebatan dalam kalangan masyarakat China di Indonesia dewasa ini lebih cenderung berada pada wilayah abu-abu. Identitas yang melekat pada masyarakat China dewasa ini telah mengalami asimilasi dan akulturasi dengan budaya Indonesia. Proses asimilasi tersebut disebabkan oleh beberapa factor, pertama factor budaya dan tradisi setempat, dan yang kedua adalah factor kekuasaan, seperti yang dijelaskan oleh Foucault di atas.

Pilihan akan identitas yang melekat pada diri orang China di Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh konstruksi budaya dan kekuasaan yang berlaku pada saat mereka ada. Dan proses asimilasi budaya tersebut akan terus berlanjut sesuai dengan perkembangan zaman.

### **Kesimpulan**

Persoalan politik identitas bukanlah sebuah masalah tentang sikap individu secara personal (*personal attitude*), melainkan lebih ditujukan kepada sikap terhadap dilemma structural dalam menterjemahkan kesetaraan dan keadilan. Sehingga kemunculan wacana politik identitas di setiap wilayah, etnis, suku, agama dan kelompok sebenarnya tidak perlu dianggap sebagai suatu ancaman bagi kelangsungan peradaban manusia. Bahkan sebaliknya, membuka dimensi-dimensi baru mengenai keadilan dan kesetaraan.

Politik identitas bukan secara sederhana dimaknai sebagai suatu pengorganisasian resistensi yang bersifat “*biner*”, yakni yang mengkategorikan “*kita*” dengan “*mereka*”, melainkan sebagai suatu pengelolaan bagi mobilisasi komunitas-komunitas resistensi.

Komunitas resistensi memerlukan suatu landasan (baik yang bersifat riil, imajiner, ataupun simbolik) yang memungkinkan tumbuhnya formasi aliansi politik dan pemberdayaan aliansi dalam kelompok-kelompok marginal. Oleh karena itu komunitas resistensi memperjuangkan ruang gerak bagi politik identitas sebagai upaya penciptaan alternatif-alternatif kemungkinan-kemungkinan politis (*the alternatives of political possibilities*).

Meskipun di dalam realitas politik kontemporer kita masih mendapati relasi kekuasaan yang bersifat ‘biner’ (dikotomis), akan tetapi kompleksitas bekerjanya kekuasaan di dalam relasi sosial saat ini tidak dapat hanya secara sederhana dipahami sebagai dua polarisasi.

Identitas sosial menentukan posisi subyek di dalam relasi atau interaksi sosialnya, sedangkan identitas politik menentukan posisi subyek di dalam suatu komunitas melalui suatu rasa kepemilikan (*sense of belonging*) dan sekaligus menandai posisi subyek yang lain di dalam suatu pembedaan (*sense of otherness*). Dikarenakan identitas juga menyakut apa-apa saja yang membuat sekelompok orang menjadi berbeda dengan yang lainnya, maka konstruksi identitas berkaitan erat dengan konstruksi mengenai ‘perbedaan’ (*difference*).

Identitas tidak jangan dicurigai sebagai ancaman terhadap keberadaan sebuah Negara, namun identitas dapat kita maknai sebagai rujukan sekaligus sebagai pengaya wacana kita dalam melihat realitas yang multikultural ini.

### **Daftar Pustaka**

Anderson, Benedict *Imagined Communities : Komunitas-Komunitas Terbayang*, (terj), (Yogyakarta: Pustaka Palajar dan Insist Press, 2001).



- Barker, Chris, *Cultural Studies : Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004).
- Foucault, Michael, *Pengetahuan dan Metode: Karya-karya Penting Foucault* (terj), (Yogyakarta: Jalasutra, 2002).
- Giddens, Anthony, *Modernity and Self Identity*, (Cambridge: Polity Press, 1991).
- Gupta, A. dan J. Ferguson, *Beyond culture: Space, Identity, and the Politics of Difference* (New York: Duke University Press, 1997).
- Hall, Stuart, Who Needs Identity, dalam Stuart Hall dan Du Gay (editor), *Questions of Cultural Identity*, (London: Sage, 1992)
- Huntington, Samuel. P., *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*, (New York: Simon & schuster, 1996).
- Kynge, James, *Rabasia Sukses Ekonomi China* (terj) (Jakarta: Mizan, 2007).  
*Majalah Tempo, edisi, Oktober, 2001*
- Montero, Maritza “Latin American Social Identity” dalam *Multiculturalism and the State*, Vol. 1, Collected Seminar Papers, London
- Russell, Bertrand, *Sejarah Filsafat Barat: dan Kaitannya Dengan Kondisi Sosio-Politik dari Zaman Kuno Hingga Sekarang* (terj), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).
- Setyaningrum, Arie, “Identitas Politik dan Multikulturalisme Dalam Proses Re-imajinasi Indonesia” (*makalah*), di sampaikan pada kuliah S2 sosiologi, (Yogyakarta: UGM, 2008).
- Week, Jeffrey, “The Value of Difference” dalam Jonathan Rutherford (ed.) *Identity Community, Culture, Difference*, (London: Lawrence& Wishart, 1990).